

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung pada periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat infrastruktur logistik nasional dan meningkatkan daya saing pelabuhan dalam jaringan perdagangan internasional. Kerja sama tersebut juga mencerminkan kepentingan Tiongkok dalam memperluas konektivitas ekonomi regional melalui kerangka Belt and Road Initiative (BRI), sehingga memperlihatkan adanya kesesuaian kepentingan antara kedua negara dalam bidang pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dilaksanakan melalui skema *Foreign Direct Investment* (FDI) berbentuk kerja sama usaha atau joint venture antara badan usaha milik negara Indonesia dan mitra investasi dari Tiongkok. Skema ini dirancang untuk tetap menjaga kendali strategis aset pelabuhan berada di bawah otoritas nasional Indonesia, sementara pihak Tiongkok berperan sebagai investor dan mitra operasional. Dengan demikian, kerja sama yang dijalankan tidak mengarah pada pengalihan kepemilikan aset strategis negara, melainkan pada penguatan kapasitas pengelolaan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kerja sama bilateral tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Sejumlah hambatan masih dihadapi, antara lain kompleksitas regulasi, koordinasi yang belum optimal antar pemangku kepentingan, keterbatasan infrastruktur pendukung kawasan industri terintegrasi, serta keterlambatan realisasi proyek dibandingkan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

perencanaan normatif (*das sollen*) dan realitas implementasi di lapangan (*das sein*), yang berdampak pada belum optimalnya fungsi Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan fisik pelabuhan, peningkatan kapasitas terminal, serta penerapan standar pengelolaan pelabuhan yang lebih modern. Investasi yang masuk turut mendorong peningkatan efisiensi operasional dan memperkuat posisi Pelabuhan Kuala Tanjung dalam sistem logistik nasional, meskipun manfaat tersebut masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah, penguatan koordinasi antarlembaga, serta kemampuan Indonesia dalam mengelola investasi asing secara selektif dan terkontrol. Kerja sama bilateral ini memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, namun hanya dapat memberikan manfaat maksimal apabila dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, kepastian regulasi yang kuat, dan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang penulis ingin kemukakan, yaitu:

### 1. Saran Praktis

Dalam konteks kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pemerintah Indonesia bersama mitra strategis dari Tiongkok serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga guna mengurangi hambatan implementasi yang selama ini muncul, khususnya terkait kompleksitas regulasi dan perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan. Penguatan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan usaha terkait

menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, peningkatan efisiensi rantai logistik nasional, serta penciptaan nilai tambah ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan alih teknologi agar manfaat kerja sama bilateral dapat dirasakan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada jangka pendek.

## 2. Saran Akademis

Kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok dalam pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung merupakan fenomena yang masih berlangsung dan memiliki dinamika yang kompleks, baik dari aspek ekonomi, kelembagaan, maupun geopolitik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kerja sama ini dengan menggunakan perspektif dan pendekatan yang berbeda, seperti analisis biaya dan manfaat (*cost–benefit analysis*), kajian dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal, atau analisis geopolitik Belt and Road Initiative dalam konteks kepentingan strategis dan keamanan kawasan. Penelitian di masa depan juga dapat memanfaatkan data primer melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait guna memperoleh gambaran empiris yang lebih mendalam. Dengan memperluas sudut pandang dan metode penelitian, studi lanjutan diharapkan mampu melengkapi keterbatasan penelitian ini serta memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif terhadap kajian kerja sama bilateral dan pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia.